

# Analisis Peran dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Fenomena Studentifikasi di Kota Surakarta

SANVIGE PRASKA KUSUMA<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota  
Institut Teknologi Nasional Bandung

Email : sanvigepraska@gmail.com

## ABSTRAK

*Pada tahun 2018 sebanyak 55% penduduk di dunia menetap di daerah perkotaan dan dimungkinkan akan mengalami peningkatan hingga 68% pada tahun 2050 (United Nations, 2018). Peningkatan jumlah penduduk tersebut akan berdampak pada peningkatan kebutuhan akan ruang gerak di pusat kota membuat ketersediaan ruang di perkotaan menjadi sangat terbatas. Pertumbuhan dan perkembangan fisik kota juga ditandai dengan peningkatan jumlah fasilitas, salah satunya adalah perguruan tinggi. Kota Surakarta merupakan kota kecil yang memiliki jumlah perguruan tinggi mencapai 51 unit, baik negeri dan swasta. Kondisi ini mendorong terjadinya perubahan kondisi fisik dan non fisik kawasan, yang baru-baru ini disebut sebagai fenomena studentifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kebijakan pemerintah dalam mengelola fenomena studentifikasi di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data hasil wawancara kepada pemerintah serta data pola ruang dan struktur ruang Kota Surakarta. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa peran pemerintah dalam mengelola fenomena studentifikasi adalah melakukan peningkatan pada sektor keamanan, pengadaan jaringan jalan dan drainase, pemberian izin usaha, serta pengadaan program-program yang sesuai dengan kawasan. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa kebijakan pola ruang dan struktur ruang Kota Surakarta dibentuk berdasarkan tren fenomena studentifikasi yang ada di Kota Surakarta.*

**Kata kunci:** Peran Pemerintah, Kebijakan Pemerintah, Pola Ruang, Struktur Ruang

## 1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2018 sebanyak 55% penduduk di dunia menetap di daerah perkotaan dan dimungkinkan akan mengalami peningkatan hingga 68% pada tahun 2050 (United Nations, 2018). Peningkatan jumlah penduduk tersebut akan berdampak pada peningkatan kebutuhan akan ruang gerak di pusat kota membuat ketersediaan ruang di perkotaan menjadi sangat terbatas. Pertumbuhan dan perkembangan fisik kota juga ditandai dengan peningkatan jumlah fasilitas, salah satunya adalah perguruan tinggi. Kota Surakarta merupakan kota kecil yang memiliki jumlah perguruan tinggi mencapai 51 unit, baik negeri dan swasta. Kondisi ini mendorong terjadinya perubahan kondisi fisik dan non fisik kawasan, yang baru-baru ini disebut sebagai fenomena studentifikasi. Kondisi ini tentunya juga akan menjadi perhatian khusus pemerintah agar keberadaannya dapat terkelola dengan baik. Peran pemerintah sangat penting dalam proses pengelolaan fenomena studentifikasi. Apabila fenomena studentifikasi dapat terkelola dengan baik, maka fenomena studentifikasi dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kota, mulai dari peningkatan pendapatan penduduk hingga peningkatan kualitas lingkungan. Tren

tersebut juga baiknya dapat tertuang dalam peraturan pemerintah berupa pola ruang dan struktur ruang.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (2007) struktur ruang diartikan sebagai susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan, pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kebijakan pemerintah dalam mengelola fenomena studentifikasi di Kota Surakarta. Penelitian ini akan melihat bagaimana peran pemerintah yang dilihat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta kebijakan pemerintah yang dilihat berdasarkan pola ruang dan struktur ruang yang telah ditentukan dalam RTRW Kota Surakarta tahun 2021-2041.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Penggunaan data primer ditujukan untuk melengkapi data-data yang tersedia agar dapat ditelaah dengan maksimal. Data primer yang digunakan adalah data hasil wawancara, sedangkan data sekunder yang digunakan adalah data pola ruang dan struktur ruang Kota Surakarta. Analisis peran pemerintah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah kecamatan, DPUPR, dan BAPPEDA Kota Surakarta. Sedangkan analisis kebijakan pemerintah menggunakan metode analisis dekskriptif kualitatif berdasarkan data pola ruang dan struktur ruang.

## 3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Analisis Peran Pemerintah Terhadap Fenomena Studentifikasi

Analisis peran pemerintah digunakan untuk mengetahui apa saja peran pemerintah dalam mengelola fenomena studentifikasi. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif menggunakan data hasil wawancara dengan pemerintah. Pemerintah yang terpilih dalam penelitian ini adalah pemerintah kecamatan, DPUPR, dan BAPPEDA. Berikut merupakan hasil analisis dari peran pemerintah terhadap fenomena studentifikasi di Kota Surakarta :

**Tabel 1. Peran Pemerintah Terhadap Fenomena Studentifikasi**

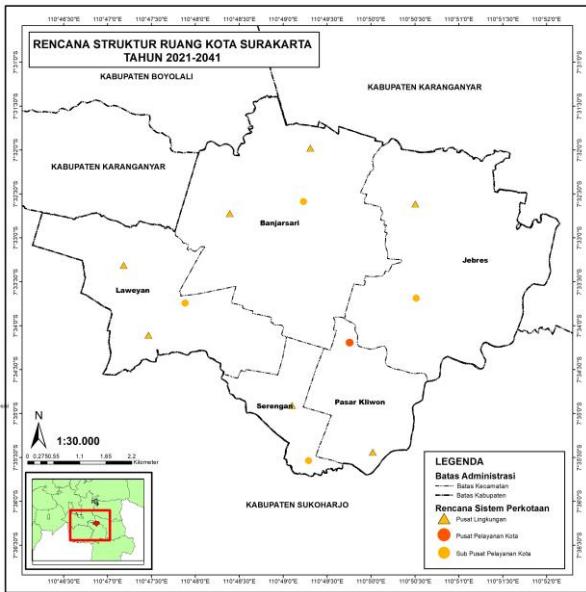
No	Pemerintah	Peran Pemerintah
1	Pemerintah Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memberikan fasilitas dalam sektor keamanan dengan meningkatkan keamanan yang ada di lingkungan kawasan perguruan tinggi</li><li>• Memberikan fasilitas yang dapat mendorong perkembangan perdagangan dan jasa, khususnya pelaku UMKM dan usaha lainnya.</li><li>• Mendukung perizinan yang berkaitan dengan kepentingan perguruan tinggi.</li></ul>
2	DPUPR	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bidang Bina Marga berperan dalam pengelolaan jaringan jalan yang ada di sekitar kawasan perguruan tinggi yang masih menjadi kewenangan pemerintah kota.</li></ul>

No	Pemerintah	Peran Pemerintah
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Bidang Sumber Daya Air berperan dalam mengelola jaringan drainase dan sempadan sungai yang ada di kawasan perguruan tinggi, sehingga dapat mengelola adanya resiko bencana.</li><li>• Bidang Cipta Karya dan Bidang Penataan Ruang Penataan Bangunan dan Lingkungan berperan dalam pemberian izin bangunan dan penataan ruang, dimana berkontribusi dalam mengembangkan perizinan terkait usaha perdagangan jasa di kawasan perguruan tinggi.</li></ul>
3	BAPPEDA	Berperan dalam mengarahkan, memfasilitasi, dan memberikan program-program yang sesuai dengan kondisi aktivitas dan tata guna lahan di kawasan

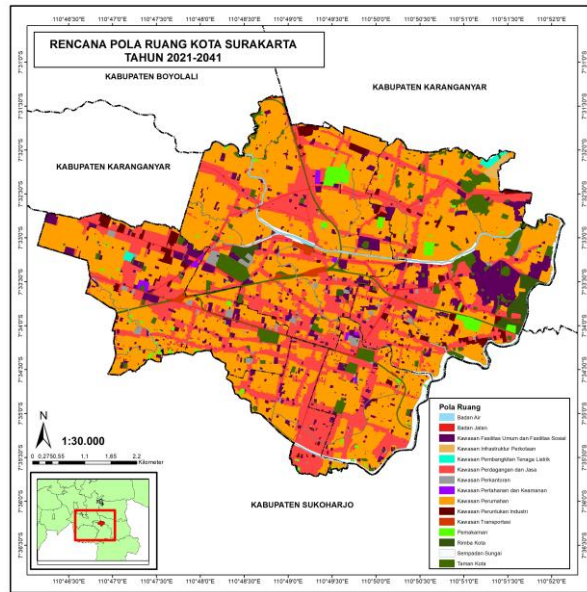
Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa setiap level pemerintah memiliki perannya masing-masing dalam mengelola fenomena studentifikasi. Peran pemerintah kecamatan hanya sebatas mendukung program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah kota serta meningkatkan sektor keamanan pada kawasan. Pemerintah kota memiliki peran lebih makro terhadap fenomena studentifikasi yang mana berkaitan secara fisik dan non fisik kawasan, sebagai contohnya pengelolaan jaringan jalan, jaringan drainase, sempadan sungai, memberikan izin bangunan dan penataan ruang, serta memberikan arahan program-program yang sesuai dengan aktivitas kawasan. Pemberian arahan program-program sebagai contohnya adalah tersedianya Solo Technopark (STP) sebagai pusat inovasi dan ilmu pengetahuan yang berlokasi di sekitar kampus UNS dan ISI Surakarta.

### 3.2 Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Fenomena Studentifikasi

Dalam analisis kebijakan pemerintah terhadap fenomena studentifikasi akan ditinjau berdasarkan pola ruang dan struktur ruang sebagai keluaran dari kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta pada Tahun 2021-2041. Proses analisis akan melibatkan tahapan penyajian data dan tahap kesimpulan. Penyajian data akan memberikan gambaran mengenai rencana pola ruang dan struktur ruang yang ada di Kota Surakarta. Sedangkan tahap kesimpulan akan mengambil inti sari dari data yang telah disajikan. Berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang Kota Surakarta tahun 2021-2041 dapat dilihat bahwa seluruh rencana tersebut dibuat dengan mempertimbangkan tren dari perkembangan fenomena studentifikasi. Seperti yang telah diketahui bahwa setidaknya terdapat sekitar 146.000 mahasiswa yang memilih Kota Surakarta sebagai tempat untuk menempuh pendidikan tinggi, hal tersebut tentunya berdampak pada potensi perkembangan Kota Surakarta, sehingga juga berpengaruh pada rencana struktur ruang dan pola ruang Kota Surakarta tahun 2021-2041.



**Gambar 1. Rencana Struktur Ruang Kota Surakarta Tahun 2021-2041 (Sumber : RTRW Kota Surakarta, 2021-2041)**



**Gambar 2. Rencana Pola Ruang Kota Surakarta Tahun 2021-2041 (Sumber : RTRW Kota Surakarta, 2021-2041)**

Dalam rencana struktur ruang Kota Surakarta tahun 2021-2041, diketahui bahwa masing-masing cluster ditetapkan sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota dan tersedia pusat pelayanan lingkungan, khususnya pada bagian utara dan timur Kota Surakarta. Maka dapat disimpulkan bahwa pada bagian timur dan utara Kota Surakarta akan berpotensi lebih berkembang dan ramai sehingga dapat memaksimalkan pengaruh positif fenomena studentifikasi di sekitar kawasan perguruan tinggi, khususnya dalam segi peningkatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan rencana pola ruang Kota Surakarta tahun 2021-2041 dapat dilihat bahwa penentuan pola ruang Kota Surakarta ini mengikuti tren perkembangan perguruan tinggi, hal tersebut juga terlihat dari keberadaan kawasan perdagangan dan jasa yang tersedia sehingga dapat menjadi dorongan agar perekonomian penduduk di Kota Surakarta meningkat

#### 4. KESIMPULAN

Peran pemerintah Kota Surakarta dalam mengelola fenomena studentifikasi di Kota Surakarta memiliki perbedaan sesuai dengan peran dan tugas pokoknya. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa setiap level pemerintah memiliki perannya yang berbeda. Peran pemerintah kecamatan hanya sebatas mendukung program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah kota serta meningkatkan sektor keamanan pada kawasan. Pemerintah kota memiliki peran lebih makro terhadap fenomena studentifikasi yang mana berkaitan secara fisik dan non fisik kawasan, sebagai contohnya pengelolaan jaringan jalan, jaringan drainase, sempadan sungai, memberikan izin bangunan dan penataan ruang, serta memberikan arahan program-program yang sesuai dengan aktivitas kawasan. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa kebijakan pemerintah diambil berdasarkan tren fenomena studentifikasi. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa pola ruang dan struktur ruang yang ditentukan dalam RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041 telah mengikuti tren fenomena studentifikasi, sehingga kondisi tersebut dapat meningkatkan dampak positif dari fenomena studentifikasi, yakni peningkatan kualitas lingkungan dan pendapatan penduduk.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini, BAPPEDA Kota Surakarta, DPUPR Kota Surakarta, dan Pemerintah Kecamatan Banjarsari, Pemerintah Kecamatan Laweyan, Pemerintah Kecamatan Jebres, Pemerintah Kecamatan Pasar Kliwon, dan Pemerintah Kecamatan Serengan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah 2019-2021*. Bps.Go.Id. [bps.go.id/indicator/2/398/1/persentase-rumah-tangga-yang-pernah-mengakses-internet-dalam-3-bulan-terakhir-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-daerah.html](https://bps.go.id/indicator/2/398/1/persentase-rumah-tangga-yang-pernah-mengakses-internet-dalam-3-bulan-terakhir-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-daerah.html)
- Pratiyudha, Pinurba Parama. (2019). Gentrifikasi dan Akar-akar Masalah Sosial: Menakar Identifikasi, Diagnosis, dan Treatment Proses Gentrifikasi Sebagai Masalah Sosial. *Reka Ruang*, 2(Tata Kota), 27–38. [https://www.researchgate.net/publication/341318131\\_Gentrifikasi\\_dan\\_Akar-akar\\_Masalah\\_Sosial\\_Menakar\\_Identifikasi\\_Diagnosis\\_dan\\_Treatment\\_Proses\\_Gentrifikasi\\_sebagai\\_Masalah\\_Sosial](https://www.researchgate.net/publication/341318131_Gentrifikasi_dan_Akar-akar_Masalah_Sosial_Menakar_Identifikasi_Diagnosis_dan_Treatment_Proses_Gentrifikasi_sebagai_Masalah_Sosial)
- Rachmawati, S. (2013). Analisis Preferensi Mahasiswa Dalam Pemilihan Tempat Kos (Studi: Kawasan Kos di Kelurahan Ketawanggede dan Kelurahan Sumber Sari, Kota Malang). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Ratnasari, R. (2016). Aspek Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat Akibat Urbanisasi (Analisis Dampak Urbanisasi terhadap Perilaku Sosial Masyarakat di Desa Margakaya 1). In UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. 2007.
- Smith, D., Alamel, A., Balsdon, S., & Kinton, C. (2013). *Studentification in Loughborough*. Chloe Kinton.
- Smith, D. P. (2002). Extending the Temporal and Spatial Limits of Gentrification: A Research Agenda for Population Geographers. *Jurnal International Journal of Population Geography*, 8.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke). CV Alfabeta.
- United Nations. 2018 Revision of World Urbanization Prospects. *Popul Dev Rev* 2018.